

**BUDAYA WANITA DI INDONESIA:
SUATU PENELUSURAN KE ARAH REKONSTRUKSI**

Sri Ana Handayani, Dewi Salindri

E-mail: Sriana.sastra@unej.ac.id, dewisalindri.sastra@unej.ac.id

Abstract

Indonesian women culture and manner change in chronological order could be searched from written source. This research problem questioned on how the Indonesian woman culture and manner changed in old order, new order, and reformation era. As a history study, this research used historical method with four stages of work, those are heuristic, critic, interpretation, and historiography. The occasion was analysed by cultural approach with postmodern theory by Derrida. The study showed that in old order, Indonesian woman started to understand feminism. However, the authority concept still covered in patrimonial hegemony authority. In new order, Indonesian women were still divided into agrarian culture and industrial culture. Dharma Wanita concept managed to adapt feminism into domestic space and public. Indonesian women in reformation era searched for an ideal women culture format as a result of globalisation and stronger gender understanding. Conclusion from this research is that in defining an ideal women, Indonesian women, on one side still crave the berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) femininity stereotype.

Keywords: Old order, New order, Reformation, Feminisme.

Abstrak

Perubahan sikap serta kebudayaan Wanita di Indonesia dapat ditelusuri secara kronologis, berdasarkan sumber tertulis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana perubahan sosial budaya Wanita Indonesia yang terjadi pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Kajian ini merupakan kajian sejarah, maka metode yang digunakan adalah metode sejarah yang memiliki empat tahapan kerja, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Untuk menganalisis peristiwa digunakan pendekatan budaya dengan teori postmodern dari Derrida. Hasil kajian memperlihatkan, pada masa Orde lama wanita di Indonesia mulai memahami feminisme. Hanya konsep kekuasaan

masih terbungkus dalam hegemoni kekuasaan patrimonial. Masa Orde Baru, Wanita Indonesia masih Indonesia masih terbelah antara budaya agraris dengan budaya industri, konsep dharma Wanita berhasil mengadaptasikan feminisme dalam ruang domestik dan publik. Masa Reformasi Wanita Indonesia mencari format budaya wanita yang ideal akibat pengaruh globalisasi dan pemahaman gender yang semakin kuat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa wanita Indonesia, di satu sisi masih mendambakan tentang wanita ideal yang distereotifkan ke arah feminitas yang berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri.

Kata kunci : Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, Feminisme.

1. Pendahuluan

Kajian mengenai wanita, sudah banyak dilakukan oleh para peneliti berbagai aspek, baik sosial, budaya, politik, maupun ekonomi. Pada dasarnya kajian wanita selalu erat dengan fenomena kesetaraan antara kaum pria dengan perempuan, perbedaan upah bagi perempuan, pemberdayaan kaum perempuan. Kajian budaya secara menyeluruh tentang Wanita Indonesia masih belum banyak ditulis, untuk itulah celah ini perlu diteliti.

Kajian tentang wanita di Indonesia yang berkaitan dengan unsur perbedaan warna kulit atau ras yang terjadi masa Kolonial Belanda, salah satunya adalah tulisan dari Reggie Baay (2009) dengan judul “Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda”. Tulisan ini menggambarkan bagaimana kehidupan wanita bumiputera yang dipersunting oleh para tuan tanah atau pejabat pemerintah Hindia Belanda. Penelitian tentang pergundikan ini berdasarkan arsip yang mendalam memberikan gambaran, bagaimana hubungan pasangan suami istri beda ras, kedudukan, serta sosial budaya pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Betapa getirnya wanita bumiputera yang dipersunting pria Eropa, karena pada umumnya pernikahan mereka tidak diakui oleh pihak kulit putih dan orang-orang bumiputera juga. Tubuh mereka hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan biologis dan menyediakan makannya bagi suami yang menjadi tuannya di rumah sendiri. Wanita bumiputera tidak pernah punya hak atas tubuhnya sendiri. Bahkan, anaknya sendiri tercerabut dari bimbingannya, karena anak-anaknya terutama anak lelaki yang terlahir sebagai Indo Eropa pun harus dikirim ke negeri leluhur suaminya, serta diputuskan asal usul dari pihak ibunya sebagai bumiputera.

Kajian Wanita berdasarkan ideologi kekuasaan salah satunya adalah tulisan dari Amuwarni Dwi Lestari (2011) dengan judul “Gerwani Derita Tapol Wanita di Kamp Plantungan” menceritakan penderitaan sebagian wanita Indonesia sebagai korban perang saudara di negara sendiri. Dari hasil kajian Amuwarni (2011) pada umumnya para wanita yang ditahan di daerah Platungan adalah wanita yang dituduh bersuamikan atau ikut terlibat dengan keaktifan partai terlarang era konflik berdarah tahun 1965-an. Mereka ditahan tanpa ada pembelaan dan dasar hukum yang kuat, dengan dalih untuk dibina kembali sesuai dengan ajaran demokrasi Pancasila. Akan tetapi, ada juga yang dipaksa untuk memuaskan nafsu para penjaga yang tidak bertanggung jawab. Pada akhirnya banyak Wanita yang ditahanan mengalami deperesi karena trauma secara phisis dan phisik. Sampai sekarang pemerintah belum menyelesaikan permasalahan korban-korban politik era Orde Baru, padahal yang masih hidup tinggal hitungan jari dan sudah uzur. Pada umumnya korban politik dari Platungan ini tidak pernah berani mengeluarkan pendapat, mereka tetap diam dalam traumanya, bahkan akhirnya mereka menyangdang stigma negative dari masyarakat saat mereka dan berbaur dengan masyarakat setelah dinyatakan bebas(Amuwarni Dwi Lestari,2011).

Kajian Wanita yang berkaitan dengan budaya cantik ditulis oleh L. Ayu Saraswati (2013), dengan judul “ Putih Warna Kulit, Ras, dan Kecantikan Di Indonesia”, bagaimana budaya cantik Wanita Indonesia mengikuti tren budaya global. Menurut Ayu (2013) budaya cantik berasal dari cantik konsep Barat, yang menerapkan ras, yaitu berkulit putih. Dengan demikian, budaya cantik itu berorientasi kepada kulit putih, umumnya Eropa dan Amerika. Tulisan Ayu sangat menarik, karena ia berhasil memahami ideal cantik wanita Indonesia dari sisi perasaan. Dengan menggunakan perspektif transnasional, maka cantik putih Indonesia adalah suatu konstruksi modern paska kolonial atau kontemporer dari kecantikan perempuan yang muncul dari proses panjang perjumpaan dan perlawanan kolonialisme Belanda, pendudukan Jepang, dan hegemoni budaya Amerika. Selain itu juga, sebagai upaya yang strategis dalam merepresentasikan dan memposisikan perempuan Indonesia dalam hierkhi global.

Dari uraian di atas, maka tergambarkan fenomenalogi Wanita dari aspek sosial, budaya, dan politik. Dalam merumuskan suatu pengertian mengenai Sejarah Kebudayaan dengan aspek kajian kebudayaan wanita Indonesia, bukan pekerjaan yang mudah, karena keberagaman etnis serta budaya yang sangat kompleks. Sampai sekarang, sebagian besar

kajian wanita masih memisahkan antara kebudayaan wanita dan sejarah wanita, seakan-akan masih terfragmentaris. Uraian mengenai kebudayaan cenderung kepada unsur-unsur yang bercorak etnografis. Karya etnografis ini lebih menitik beratkan kepada aspek kehidupan masyarakat yang dibatasi dengan geografi. Adapun tulisan wanita yang mengkaji wanita dari aspek historis, menitik beratkan kepada sejarah politik. Sejalan dengan kemajuan zaman serta arus globalisasi, maka tulisan sejarah yang komprehensif tentang kajian wanita yang berakaitan dengan sejarah dan budaya sangat diperlukan. Jadi tulisan ini berupaya untuk menelusuri perubahan budaya yang menunjukkan pertalian unsur-unsur budaya wanita Indonesia melalui proses historis.

Pengkajian sejarah budaya Wanita, dapat dikembangkan untuk; pertama menawarkan kerangka konseptual yang diharapkan menjadi landasan bagi penulisan Sejarah Wanita Indonesia secara komprehensif. Kedua menawarkan tematik penulisan sejarah budaya Wanita Indonesia.

2. Metode Penelitian

Kajian tentang Budaya Wanita Indonesia: Suatu Penelusuran ke Arah Rekonstruksi, untuk memetakan dan melihat aspek perubahan sosial dan budaya Wanita Indonesia masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. wajian perubahan budaya Wanita yang ditinjau dari perspektif sejarah diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman sejarah wanita yang punya peran penting dalam pembangunan bangsa. Untuk mengkaji perubahan kebudayaan wanita Indonesia secara kronologis, maka metode yang digunakan adalah metode sejarah. Tahapan dalam metode sejarah berupa heuristik, kritik, interpretasi, serta Historiografi (Gottslak,1975).

Kajian ini berdasarkan kajian pustaka, sehingga pengumpulan sumber yang dalam hal ini adalah tahanan heuristik merupakan sumber sekunder. Sumber berupa buku-buku yang mengkaji tentang wanita, berasal dari berbagai buku referensi yang relevan dengan penelitian ini. Kritik dilakukan setelah sumber tersedia, kemudian meneliti berbagai aspek yang berkaitan dengan wanita Indonesia dari sudut pandang historis. Interpretasi dilakukan pada saat hendak menganalisis data, agar tulisan ini dapat memperlihatkan kebaruannya. Langkah terakhir adalah penulisan hasil dari kajian tentang perubahan sosial budaya Wanita Di Indonesia secara kronologis yang dimulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, sampai Reformasi.

Pada saat menganalisis data, maka peneliti menggunakan pendekatan antropologi kebudayaan. Adapun teori yang dapat memberikan konstruksi yang relevan dengan zamannya adalah teori postmodern. Postmodern mengajukan alternatif untuk menerima perbedaan di luar sistem-sistem dan narasi-narasi besar (Tommy F. Awuy. 1994). Untuk memaparkan kajian perubahan budaya wanita di Indonesia yang sangat beragam, baik etnis maupun budaya, maka ada wacana-wacana kecil dari relasi pergaulan sehari-hari yang dapat diamati untuk memahami perubahan. Menurut Derrida (dalam Tomy F. Awuy. 1994) dalam pemikiran postmodern ada konsep dekonstruksi yang memiliki pengertian *difference* sekaligus *to differ* yang berkonotasi temporal. Hal ini menandakan bahwa antara konsep dengan realitas mempunyai jarak sekaligus memiliki perbedaan. Akan tetapi, dalam perbedaan masih memiliki relasi yang lain. Jadi teori dekonstruksi terhadap fenomenologi, dapat membedah perjalanan sejarah panjang budaya wanita di Indonesia untuk membentuk individu yang emansipasif serta mandiri.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Masa Orde Lama: Arah dan Perjuangan

Negara mempunyai tanggung jawab terhadap keberlangsungan tatanan sosial masyarakatnya. Kebijakan pemerintah untuk mengatur negara dan rakyatnya berdampak bagi pembentukan karakter serta perubahan ke arah yang lebih baik.

Pada awal kemerdekaan, Republik Indonesia harus berhadapan dengan Pemerintah Belanda yang dibantu oleh Sekutu dari tahun 1945 sampai awal tahun 1950-an. Kemudian masa menentukan sikap serta dasar bernegara yang dikenal sebagai demokrasi liberal yang berlangsung 1950-1959-an. Dengan dikeluarkannya dekrit Presiden untuk Kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, maka negara republik Indonesia memasuki babak baru dalam proses sejarahnya. Masa Orde Lama ditandai dengan Demokrasi Terpimpin, serta konsep berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri.

Di balik pemahaman demokrasi terpimpin, ada berbagai rasa gelisah dari berbagai partai untuk menentukan keberlangsungan berbangsa dan bernegara. Masyarakat Indonesia menghadapi perubahan kehidupan, dari masa keterkungkungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari pemerintahan colonial Belanda, serta pendudukan Jepang menjadi bangsa yang berdaulat. Berbagai kebijakan dirumuskan untuk membangun bangsa dan negara serta memperbaiki mental manusia Indonesia menjadi manusia yang optimis untuk masa depan. Hal ini tidak terkecuali bagi Wanita

Indonesia, yang pada masa masa sulit, sudah mulai menyadari sebagai bagian dari warga yang harus ikut membebaskan bangsanya dari berbagai kemelut dalam kemerdekaan.

Berbicara selintas tentang kesadaran wanita di Indonesia sebagai warga negara terbentuk melalui berbagai tempaan, pada masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, serta masa awal-kemerdekaan. Masa Kolonial, kesadaran bernegara lebih ke arah angkat senjata, berbagai peristiwa heroik tampil ke permukaan, seperti peristiwa perjuangan Cut Nya Dhien. Kesadaran sosial tumbuh, seperti lahirnya pemikiran Kartini, Dewi Sartika, Rachmah El Yunus di bidang pendidikan., Kesadaran berorganisasi, lahirnya organisasi Wanita, Aisyiah sebagai bagian dari orrganisasi wanita organisasi besar Muhammadiyah, Istri Sedar, dan sebagainya. Masa penduduk Jepang, Wanita diorganisir oleh Jepang dalam organisasi Fujinkai untuk bela negara, terutama mempersiapkan dapur umum. Masa Revolusi Phisik ikut dalam perjuangan memepertahankan kemerdekaan.

Pemahaman kesadara wanita di bidang sosial dan politik era Orde Lama menarik untuk dikaji. Kaum Wanita sudah menjadi perhatian Soekarno. Pemikiran Soekarno (2014) tentang wanita, emansipasi, serta feminimisme ditulis sekitar tahun 1947, yaitu “Sarinah Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia”. Sarinah adalah konsep Soekarno tentang wanita Indonesia yang revolusioner serta bahagia dalam kemerdekaan. Pesan Soekarno untuk Wanita Indonesia dalam Sarinah yaitu “... Hai Wanita Indonesia jadilah revolusioner, tiada kemenangan revolusioner, jika tidak ada wanita revolusioner, dan tiada wanita revolusioner, jika tidak ada pedoman revolusioner”. Ajakan Soekarno menjadi wanita revolusioner menjadi salah satu penyemangat kesadaran wanita untuk ikut berperan memajukan bangsanya, terutama kaum wanitanya yang masih terbelenggu dalam tradisi yang dianggap menghambat gerak kaum wanita. Sarinah sangat mempengaruhi pemikiran pembacanya, terutama kaum wanita Indonesia. Konsep Soekarno tentang Revolusi belum selesai, juga menjadi dasar dari aktivitas organisasi wanita pada umumnya. Sekitar tahun 1964, pemerintah mengintruksikan agar organisasi massa mengikatkan diri pada partai politik, termasuk organisasi massa wanita.

Organisasi massa, termasuk organisasi wanita pun mengikuti anjuran dari pemerintah. Partai yang berbasis keagamaan meneruskan perjuangannya, seperti Aisyah sebagai bagian Gerakan Wanita dari Muhammadiyah. Sejak awal dibentuk Aisyaih bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang nilai keagamaan, kesadaran Pendidikan bagi Wanita, serta perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Aisyah tetap konsisten

dengan perjuangannya, untuk membebaskan Wanita dari belenggu tradisi yang tidak menguntungkan kedudukan Wanita, pendidikan, serta pelatihan ketrampilan kewanitaan untuk bekal kehidupan Wanita dan keluarga secara ekonomi. Sampai sekarang Aisyiah, tetap memperjuangkan hak-hak perempuan dalam berbangsa dan bernegara. Aisyiah berhasil memberikan kesadaran kepada kaum wanita, untuk berperan dan berkiprah dalam pembangunan bangsa, terutama di bidang p dan pendidikan (Dyah Pikanti D., dkk, 2019).

Salah satu organisasi massa yang bergerak di bidang sosial budaya dan politik masa Orde Lama adalah Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia, merupakan organisasi yang bergerak berdasarkan ideologi feminis sosialis. Sejak awal berdiri, tanggal 4 Juni 1950, Gerwani ini bergerak di bidang sosial budaya dan politik, tujuan organisasi adalah menjadikan wanita Indonesia memiliki semangat kerja keras. Kegiatannya berupa penyuluhan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Wanita sebagai warga negara (Susan Blacburn,2004). Gerwani fokus pada isu-isu perempuan dan nasionalisme. Salah satu yang diperjuangkannya adalah mendorong perubahan undang-undang perkawinan serta masalah poligami yang dianggap tidak adil bagi wanita (Susan Blacburn,2004). Sesuai dengan himbuan pemerintah pada tahun 1964, bahwa organisasi massa harus bergabung dengan partai politik, maka Gerwani bergabung dengan Partai Komunis Indonesia. Bahkan dapat dikatakan, Gerwani cenderung lebih focus di sektor public dalam berbagai kegiatannya yang berkaitan dengan membangkitkan kesadaran wanita, untuk menyadari akan hak dan kewajibannya (Susan Blacburn, 2014). Gerakan Gerwani akhirnya terhenti seiring dengan dibubarkannya organisasi PKI beserta Gerwani karena dianggap punya peran penting dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Dari dua contoh organisasi Wanita yang berlandaskan agama Islam serta feminis sosialis, maka Wanita Indonesia terutama dari kelas elite atau berpendidikan sudah mulai menyadari bahwa kemerdekaan Indonesia pun harus diisi dengan peran wanita untuk berkiprah di sektor publik, selain domestik. Memang perlu adanya pembenahan-pembenahan yang berkaitan dengan kesadaran wanita terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Apapun ideologi pergerakannya, perjuangan organisasi wanita difokuskan kepada kesadaran wanita akan hak dan kewajibannya sebagai warganegara. Hal ini menandakan, pada masa Orde Lama, Wanita Indonesia masih berjuang untuk

persamaan hak dalam kehidupan sosial budaya. Karena tradisi yang masih mengikat Wanita, berupa ranah domestic, masih diterima oleh Sebagian besar Wanita di Indonesia.

Kebijakan Soekarno yang berkaitan dengan anti imperialis dan kapitalis barat, bukan saja berdampak bagi masyarakat secara umum, melainkan juga bagi kehidupan Wanita. Cetusan berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri mempengaruhi pola pikir serta gerakan wanita Indonesia. Berbagai Gerakan Wanita, di Amerika dengan Gerakan feminisme liberalis, atau Rusia dengan Gerakan feminis sosialis tidak menarik perhatian mereka, walaupun ada yang menggunakan ideologi feminis sosialis, seperti Gerwani. Pada umumnya gerakan feminisme Barat, tidak begitu mendapat respons yang baik dari organisasi massa di Indonesia.

Indonesia pada masa Orde lama anti terhadap kebudayaan barat, terutama leberilme dan kapitalisme. Hal ini berimbas juga pada budaya Wanita Indonesia. Pakaian wanita Indonesia dengan model Barat mulai menjadi bahan cercaan. Tumbuh kesadaran berpakaian nasional yang berkaitan dengan jati diri. Kebaya semakin populer dan identitas diri wanita Indonesia. Bahkan, pada masa Orde lama, dapat dikatakan kebaya juga melambangkan feminisme Indonesia yang berkaitan dengan perlawanan pakaian barat yang menggambarkan kemodernan. Akan tetapi, karena dianggap sebagai sebagai symbol dari imperialisme dan kapitalisme Barat, maka pakaian Barat sebagai simbol kemodern diganti dengan beragam pakaian daerah. Kebaya menjadi pakaian nasional Wanita Indonesia, yang secara umum digunakan, dan tidak terlalu mendapat pertentang dari berbagai kalangan serta golongan perempuan di Indonesia. Kaum muslim yang menggunakan kebaya, berusaha untuk menutup rambut yang tersisir rapih dengan seuntai kain penutup kepala, atau kerudung, seperti yang sering digunakan oleh para aktivis muslimah dari organisasi massa yang berbasis agama. Kebaya dapat diterima karena mempunyai nilai estetika dan etis yang disepakati bersama dalam berbusana. Dengan demikian, penggunaan busana kebaya sudah mewujudkan rasa nasionalisme bagi Wanita Indonesia. Wanita Indonesia semakin mencintai pakaian nasional dalam bentuk kain dan kebaya sebagai indentitas nasional. Hal ini juga merangsang bangkitnya produksi kain sebagai industri kecil . Akan tetapi sejalan dengan kejatuhan Orde Lama, di mana Indonesia mengalami krisis ekonomi, maka produksi rakyat dalam bentuk industry kecil gulung tikar.

Soekarno (2014) dalam bukunya *Sarinah*, mengulas banyak tentang wanita, bahkan menguraikan tentang pandangan dan keinginannya untuk membebaskan wanita dari tradisi yang membelenggu kebebasan wanita. Buku ini mempengaruhi para pembacanya, terlepas dari fakta sosialnya, di mana Soekarno masih melakukan poligami. Sebagai pimpinan tertinggi Indonesia, fenomena poligaminya menjadi bahan pembicaraan. Sebagian wanita menganggap poligami merugikan Wanita, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Sebagian Wanita menganggap poligami telah menjadi tradisi sehingga dianggap sebagai hal yang biasa saja, kelompok ini mentoleransi adanya poligami..

Poligami akhirnya menjadi isu yang cukup menarik bagi wanita di Indonesia era Orde lama. Perbedaan pandangan dalam hal poligami, tidak memicu konflik berkepanjangan di antara wanita Indonesia. Beberapa organisasi wanita masih bersama-sama membicarakan jalan ke luar untuk mencari titik temu di antara kaum perempuan dulu. Hal ini berlangsung melalui berbagai pembicaraan pribadi atau individu, atau diskusi dengan berbagai organisasi Wanita, tokoh masyarakat, serta pejabat pemerintahan.

Pada masa Orde Lama gerakan feminimisme yang berlangsung di luar Indonesia, seperti di Amerika dan Eropa, tidak terlalu terdengar gaungnya di Indonesia, karena pemerintah menerapkan anti imperialisme dan kapitalis Barat. Hanya segelintir orang yang membaca yang mengikikuti gerakan ini. Sebagian besar Wanita Indonesia justru memperhatikan bangsanya sendiri melalui organisasi kewanitaan dari bagian besar organisasi masa ini masih memberikan kesadaran kepada kaum perempuan akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan slogan revolusi belum selesai. Budaya kota yang identik dengan budaya modern ala Barat, belum menjadi budaya sehari-hari. Sebagian besar Wanita Indonesia masih memegang erat budaya agraris yang lebih fokus kepada masalah keluarga dan domestik.

Kondisi politik yang terfragmentasi pada Orde Lama, membuat wanita Indonesia juga terfragmentasi dalam pergerakannya. Aktivitas yang masih terfragmentasi ini mengakibatkan wanita Indonesia menjadi berbeda dalam memandang suami perintawa atau gerakan di sektor publik. Akan tetapi, hal ini bukan berarti tidak ada perubahan sikap Wanita, walaupun perlahan aktivitas organisasi wanita di bidang sosial budaya,

keagamaan, serta politik sudah memberi pengaruh yang positif bagi. Wanita Indonesia mulai menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga.

Kondisi politik yang terfragmentasi dalam berbagai ideologi membawa Wanita Indonesia terfragmentasi dalam pemahaman sosial budaya secara umum. Hanya dalam satu fenomena ada identitas wanita Indonesia tetap terjaga, yaitu dalam balutan pakaian nasional. wanita Indonesia selalu tampil dalam kain kebaya, di mana mereka berada, baik di ruang publik maupun ruang domestik.

3.2 Orde Baru: Menentukan Identitas

Masa Orde baru merupakan masa pemulihan kondisi ekonomi yang terpuruk pada saat Orde lama. Konsep pembangunan manusia Indonesia ke arah masyarakat modern mulai digaungkan. Istilah modernisasi mulai dikenal di segala bidang, termasuk dalam masalah sosial budaya. Budaya modern mulai merasuki kehidupan masyarakat Indonesia dengan demokrasi Pancasila sebagai filter budaya Barat.

Bagaimana pemerintah Orde Baru ikut menata dinamika wanita. Tradisi berorganisasi bagi wanita tetap dijalankan, hanya saja kebijakan pemerintah berbeda dengan masa Orde lama. Orde lama menggunakan slogan revolusi belum selesai, sedangkan pemerintah Orde Baru menggunakan slogan Peran Ganda Perempuan.

Slogan Peran Ganda bagi perempuan merupakan suatu konsep yang menghimbau wanita bertanggung jawab di dalam rumah atau sektor domestik, dan aktif luar rumah sektor publik (Fitriyana K.D. dan Gayung Kusuma,2014). Peran ganda ini merupakan konsep perpaduan antara masyarakat modern yang diwakili oleh budaya urban dengan masyarakat tradisional yang diwakili oleh budaya agraris. Dibentuk organisasi Wanita yang terpusat, seperti seperti Dharma Wanita untuk istri Pegawai Negeri Sipil, Dharma Pertiwi untuk istri tentara, yang nanti mempunyai peran dalam menggerakkan PKK atau Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang dibentuk diberbagai kecamatan, di seluruh wilayah Indonesia (Fitriyana K.D. dan Gayung Kusuma,2014).

Pemerintah juga menjalankan Program Keluarga Berencana atau (KB), walaupun KB ditujukan bagi suami atau istri, tetapi pada awalnya yang dipaksa untuk ikut KB adalah perempuan. Awalnya program KB ini menimbulkan berbagai polemik dan dilema, karena faktor budaya dan agama yang masih sulit menerima cara penggunaan alat kontrasepsi. Secara politis, kebijakan pemerintah menerapkan KB bertujuan untuk mengendalikan kelahiran. Dalam penerapannya, petugas dan pemangku kepentingan

memasakkan KB bagi perempuan, terutama dari kalangan menengah bawah (Fitriyana K.D. dan Gayung Kusuma,2014). Namun pada akhirnya, kaum kanita terutama generasi muda menganggap ikut Keluarga Berencana bukan karena pemaksaan lagi, tetapi kesadaran pribadi.

Kebijakan yang berkaitan dengan poligami zaman Orde Baru, diterapkan terutama untuk pegawai negeri sipil dan pejabat negara. Hal ini, dianggap keberhasilan oleh para aktivis wanita, karena semakin jelas hukum perkawinan di Indonesia, walaupun masih banyak yang menentang aturan ini karena dianggap melanggar tradisi serta ajaran agama.

Peran ganda diterapkan, terutama bagi istri para pejabat pegawai negeri, di mana perannya sebagai istri harus dapat mengayomi serta memberikan pencerahan bagi istri-istri lain di lingkungan instansi suami. Kegiatan wanita dalam Peran Ganda, bukan karena profesionalisme, tetapi karena jabatan suami di tempat kerja. Hal ini berdampak wanita, terutama istri dari para pejabat yang harus selalu mendampingi suami. Sebagai istri harus dapat mensukseskan karier suami, selain mengerjakan tugas domestik. Dapat dikatakan, konsep peran ganda ini, justru mengikat wanita terhadap kemajuan karier suami, bukan untuk menentukan sikap wanita terhadap hak nya sebagai individu.

PKK, secara umum mempunyai pengaruh yang positif bagi Wanita di pedesaan, secara tidak langsung telah membangun posyandu balita yang kemudian mengarah ke orang tua atau manula.paling tidak mereka memahami tentang peran Wanita dalam membesar anak, serta kesadaran gizi, dan Pendidikan. Hanya saja PKK tidak berjalan dengan baik di seluruh wilayah Indonesia. PKK apabila diterapkan sesuai dengan aturan dapat menyadarkan wanita akan dirinya sebagai warga yang harus bertanggungjawab kepada keluarga dan lingkungannya. Sedikit-demi sedikit, terjadi perubahan dalam pola piker sosial budaya masyarakat, terutama masyarakat pedesaan.

Dengan adanya KB, bagi Wanita terutama dari kelas menengah dan atas, mempengaruhi pemikiran Wanita. Keluarga Berencana yang awalnya berjalan dengan tersendat-sendat, tetapi lama kelamaan menjadi konsep berkeluarga kecil sejahtera dan bahagia. Dengan keluarga kecil, akhirnya wanita dapat menata keluarga masa depan bagi-anak-anaknya, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, baik anak laki maupun perempuan. Secara sosiologis wanita semakin mendapat perhatian di bidang pendidikan, karena slogan KB adalah dua anak cukup laki perempuan sama,. Dengan Pendidikan yang

memadai wanita dapat menunda pernikahan dini, mengembangkan profesinya, baik di bidang keilmuan, politik, atau di bidang kewirausahaan,. Hal ini berarti wanita semakin merasa tanggung jawab sebagai warga negara yang harus menjalankan hak dan kewajibannya.

Kebangkitan Islam di dunia sekitar awal tahun 1980-an, mempengaruhi fashion Wanita Indonesia dalam berbusana. Kesadaran masyarakat muslim di dunia akan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan tingkat kedalaman agama, etika, dan estika Islam telah mempengaruhi masyarakat dalam sistem sosial dan budaya, termasuk di Indonesia. Islam mengajarkan berpakaian bagi Muslimah, di mana harus menggunakan pakaian yang menutup aurat sesuai dengan ajaran Islam (Abdurrohman Azzudi,2016). Memang terjadi berbagai perdebatan dan konflik dalam berbusana bagi wanita Indonesia, misalnya dengan busana nasional, kebaya. Di mana kaum Muslimah menginginkan kebaya yang sesuai dengan ajaran Islam, sementara yang bukan Islam tetap menganggap kebaya konvensional sesuai dengan pakem yang mencirikan busana nasional. Bahkan untuk menggunakan jilbab bagi wanita perlu perjuangan Panjang, berbagai pandangan tentang berjilbab menjadi wacana nasional masa Orde Baru, salah satunya dari tokoh masyarakat seperti (Quraish Shibab (2004). Dari perjalanan panjang hasil diskusi, perdebatan, serta kajian para tokoh agama, masyarakat, dan kajian ilmiah, maka ditemukan titik temu busana kebaya yang islami. Di sini kaum Wanita Indonesia dapat beradaptasi dengan gaya berbusana, di mana kebaya pun dapat eksis dengan fashion yang islami. Bagaimana kaum wanita Indonesia yang multi etnik dan beragam dalam kepercayaan, emikirkan masalah bertoleransi, dalam berbusana (Syarufidin, 2004).

Secara umum, Peran Ganda yang selalu didengungkan oleh pemerintah Orde Baru untuk menata kehidupan wanita Indonesia, belum berhasil mengubah citra Wanita Indonesia menjadi mandiri terhadap diri sendiri. Slogan peran ganda, bahkan melegitimasi wanita terhadap kekuasaan kaum pria, karena wanita dianggap hanya sebagai pendamping pria untuk mensukseskan karier suami, Wanita masih perlu berjuang untuk mengubah pandangan Wanita dan masyarakat tentang berdiri di atas kaki sendiri untuk menentukan sikap, dan melakukan aktivitas kerja di bidang sosial, politik, serta ekonomi secara profesional.

Slogan Peran Ganda adalah slogan bagi Wanita yang dianggap semu, karena dianggap justru membelenggu aktivitas perempuan untuk berkarya di sektor publik,

karena wanita aktif di sektor publik hanya sebagai kewajiban untuk mensukseskan karier suami. Hal ini dianggap tidak memberikan kemerdekaan pada wanita terhadap tubuh serta jiwa (mengambil dari pemahaman dekonstruksi untuk konstruksi). Kebijakan yang dianggap sesuai dengan tradisi Indonesia itu, membuat wanita Indonesia tidak bebas dengan keinginannya sendiri. Slogan Peran ganda, dianggap tidak mengubah wanita Indonesia menjadi dinamis sebagai warga negara.

3.3 Era Reformasi: Wanita dan Tantangan Masa Depan

Era reformasi menata Kembali system sosial masyarakat Indonesia melalui berbagai kebijakan, kebijakan masa Orde Baru yang dianggap tidak mendukung pembangunan mulai diganti. Masa Reformasi menata Kembali ttanan sosial masyarakat Indonesia. Pembangunan manusia Indonesia diarahkan bukan untuk menjadi negara modern semata-mata tetapi menjadi negara yang berdaulat dan mandiri secara politik dan ekonomi. Masa reformasi merupakan masa di mana Indonesia mencari nilai baru dalam menformat manusia baru Indonesia yang lebih produktif untuk menuju masyarakat yang sejahtera.

Konsep pembangunan manusia Indonesia masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kalla, kembali ke arah pemikiran Soekarno, yaitu tentang revolusi mental yang kemudian dikenal dengan *Nawa Cita*. Sejalan dengan konsep pembangunan manusia Indonesia melalui *Nawa Cita*, diharapkan bangsa Indonesia, dapat maju, berdaulat, dan mandiri di bidang sosial, politik, dan ekonomi. *Nawa Cita* merupakan prioritas pembangunan yang menyangkut tentang, reformasi sistem pemerintahan, membangun dan memperkuat pinggiran dalam kerangka negara kesatuan, memperkuat kebhinekaan melalui restorasi sosial, negara memberi perlindungan dan rasa aman bagi warga negaranya, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan sehat, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, mewujudkan kemandirian ekonomi, melakukan revolusi karakter bangsa, meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasaran internasional..

Nawa Cita telah memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk mengaktualisasikan diri beserta kiprahnya dalam pembangunan bangsa. Dalam pembangunan manusia Indonesia, wanita dituntut untuk memahami budayanya sendiri, serta kemajuan zaman yang mau tidak mau akan mempengaruhi kehidupannya.

Dengan kemajuan teknologi, media massa merupakan, Kebebasan untuk mengekspresikan menguntungkan Wanita untuk mengaktualisasikan profesionalismenya baik di bidang sosial, budaya, maupun politik secara mandiri. Spirit etika kepedulian wanita melalui politik bahasa sudah mulai diinternanalisasikan, melauai pemahaman gender. Hanya saja, batasan-batasan kebebasan ini perlu dipahami sebagai alat untuk memahami gender dalam demokrasi Pancasila.

Beberapa perubahan tatanan wanita yang berkaitan dengan tatanan normatif sudah terealisasi, seperti 30% perempuan dalam pemilu, Undang-undang Perkawinan, KDRT, terbentuknya KOMNAS HAM Perempuan, organisasi masa wanita atau komunitas yang mengatasnamakan wanita yang peduli akan kesetaraan, serta lainnya. Kesetaraan sudah mulai terbangun, akan tetapi belum berkeadilan, masih ada bias gender. Bahkan, mulai ada upaya ideologi konvensional dari golongan konservatif, agar wanita kembali ke ranah domestik, melalui propaganda pernikahan dini, poligamia, dan kontrol atas tubuh wanita.

Seperti yang pernah diungkapkan oleh Arief Budiman (1981), bahwa wanita harus dibebaskan dari belenggunya bukan hanya sekedar keperluan moral semata-mata, akan tetapi memang tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sudah waktunya Wanita berkiprah di sector public untuk kepentingan kesejahteraan Bersama, bukan untuk menyetarakan kedudukan antara laki dan perempuan. Wanita yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, mendukung menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera yang berarti negara dapat bertahan sepanjang masa.

4. Kerangka Konseptual

Sejarah Kebudayaan sebagai suatu konsep dalam historiografi Indonesia tidak mudah untuk dirumuskan, masih perlu pemahaman dan pembenahan yang mendasar. Historiografi yang berkaitan dengan kebudayaan keraton Solo dari Darsiti Soeratman, juga mengungkapkan tentang kehidupan puteri-puteri keraton secara spesifik, bagaimana tata kehidupan, etika, serta norma yang harus dipahami. Aturan baku keraton harus dipahami dan dijalankan dengan *sumarah* oleh para putri serta wanita-wanita keraton lainnya. Dari tulisannya tergambar bagaimana kehidupan wanita di lingkup keraton yang penuh dengan berbagai aturan. Hanya tulisan Darsiti Suratman perhatian atau fokus utamanya kepada kehidupan penguasa keraton, tulisan yang berkaitan dengan kehidupan

Wanita keraton, merupakan bagian dari sistem sosial yang berlaku di keraton. Uraian detail tentang budaya wanita secara menyeluruh tidak menggambarkan, misalnya bagaimana hubungan wanita keraton dengan hubungan wanita dari luar keraton. Sangat menarik, seandainya kehidupan wanita keraton tergambarkan dengan kisah-kisah kecil bersama masyarakat dari luar keraton.

Pemikiran Burke (1997) tentang konsep kebudayaan adalah bahwa kebudayaan merupakan milik setiap orang. Pada dasarnya ekspresi kebudayaan mencerminkan kebebasan budaya. walaupun dalam kenyataannya ada kendala struktural. Salah satu pendekatan untuk menulis sejarah Kebudayaan Wanita di Indonesia dapat menggunakan konsep *the great tradition*, yaitu kebudayaan terpancar dari negara atau pusat kekuasaan, dan *little tradition*, yaitu budaya yang berkembang dari masyarakat di luar pusat kekuasaan. Dalam hal ini budaya wanita Indonesia secara nasional tidak harus selalu mengikuti aturan pusat kekuasaan, karena budaya tidak homogen atau tidak dapat diseragamkan. Akan tetapi, dengan berbagi penggalan manuskrip, artefak peninggalan yang berkaitan dengan dinamika sejarah wanita di Indonesia, maka transformasi nilai atau pewarisan nilai budaya dapat dilakukan secara efektif.

5. Kesimpulan

Kajian wanita perlu dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah kajian sejarah budaya yang tidak terfragmentaris antara sejarah dan budaya, tetapi dapat mencakup penulisan sejarah yang komprehensif, yang ada pertalian unsur budaya melalui proses historis.

Masih banyak peluang untuk menggali tulisan sejarah wanita yang komprehensif, sumber dari masa Kolonial Belanda, Jepang, serta masa kemerdekaan perlu ditelusuri, serta dituangkan dalam tulisan sejarah yang visioner. Tulisan sejarah wanita bukan semata-mata untuk mengingatkan peranan dan emansipasi, akan tetapi harus diterjemahkan dalam pengertian yang lebih luas, yaitu tanggung jawab sebagai warga negara yang berkarakter kuat dan dapat merespons globalisasi.

Daftar Pustaka

Awuy, Tommy F. "Menolak Logosentrisme, Merayakan Perbedaan Tentang Asal Usul Postmodernisme dalam Kancah Filsafat Barat" dalam *Kalam*. Edisi I. 1994. Hal. 47-53.

- Azzudi, Abdurrohman. "Politik Penguasaan Tubuh Perempuan Dalam Implementasi Perda Syariah di Aceh". Dalam *Perempuan: Jurnal untuk Pencerahan dan Kesetaraan*: Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. 14-07-2016.
- Baay, Reggie. *Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda*. Penerjemah Siti Hertini Adiwoso. Depok: Komunitas Bambu. 2017.
- Blacburn, Susan. *Women and The State in Modern Indonesia*. Combridge : Cambridge University Press. 2004.
- Budiman, Arief. *Pembagian Kerja Secara Seksual: sebuah Pembahasan Sosiologis tentang peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1981.
- Burke, Peter. *Varieties of Cultural History*. Cambridge: Polity Press. 1997
- Dewi, Vitriyana Kusuma dan Gayung Kusuma." Perempuan Masa Orde Baru (Studi Kebijakan PKK dan KB Tahun 1968-1983). Dalam *Veerleden: Jurnal Kesejarahan*. Vol.4. No. 2. Juni 2014.
- Diwanti, Dyah P. Kanthi, dkk. Pemberdayaan Perempuan melalui Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiah . Dalam *Nusantara*. Vol 6 No. 02. Tahun 2019. Hal. 194-206
- Gottshalk, L. Mengerti Sejarah. Jakarta: UI Press. 1975.
- Lestari, Amurawani Dwi. *Gerwani Derita Tapol Wanita di Kamp Plantungan*. Jakarta: Kompas. 2011.
- Robert Redfield. *The Little Community and Peasant Society and Culture*. Chicago: The University of Chicago Press. 1967.
- Saraswati, Ayu L. *Putih Warna Kulit, Ras, dan Kecantikan Di Indonesia Transnasional*. diterjemahkan Ninus D. Andarnuswari. Serpong: Marjin Kri. 2013
- Shihab, Quraish. *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu dan Kontemporer*. Jakarta: Lantera Hati. 2004.
- Soekarno. *Sarinah Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia*. Jakarta: Media Presindo. 2014.
- Soeratman, Darsiti. *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*. Yogyakarta: tamansiawa. 1989.
- Syarifudin. "Agama dan Benturan Peradaban" Dalam *Substantia*. Vol.16 No. 02. Oktober 2004